

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan merupakan isu yang kritis dan strategis dalam kehidupan masyarakat, karena perekonomian merupakan hal yang begitu penting untuk kehidupan sehari-hari. Persoalan kemiskinan saat ini begitu perhatian karena hal ini akan sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah, termasuk untuk kemajuan Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah provinsi ke-28 di Indonesia yang berlokasi di ujung barat pulau Jawa dengan catatan penduduk miskin yang cukup besar dari persentase jumlah penduduknya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 12.431,390 juta jiwa, dengan jumlah data penduduk miskin sebanyak 791,610 ribu jiwa atau (5,84%). Terkhusus pada Kabupaten Pandeglang, tercatat data BPS jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 1.325,950 dengan catatan penduduk miskin sebanyak 113,450 ribu jiwa.<sup>1</sup>

Upaya pengentasan kemiskinan terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan pemerintah menghapuskan kemiskinan Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan tujuan-tujuan lainnya, seperti dunia yang bebas dari kelaparan, semuanya akan tercapai jika kemiskinan diberantas atau setidaknya dikurangi. Tak perlu dikatakan lagi, kemiskinan adalah masalah abadi yang terus dihadapi Indonesia dan yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk diatasi.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Banten, 2023-2024', *Badan Pusat Statistik*, 2024 <<https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>>.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pengentasan kemiskinan menjelaskan tentang beberapa program pengentasan kemiskinan telah diupayakan pemerintah pada masa itu diantaranya program Inpres Desa Tertinggal, Tabungan Keluarga Sejahtera dan juga Kredit Usaha Rakyat. Walaupun masyarakat sudah merasakan kehadiran pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan namun angka kemiskinan belum berhasil ditekan secara signifikan. Program yang dicanangkan ataupun sudah dijalankan oleh pemerintah pada masa itu belum mampu menekankan masalah kemiskinan secara signifikan dan Membuat strategi baru guna mengentaskan kemiskinan dapat diturunkan hingga 7-8% dengan menetapkan strategi baru oleh pemerintah yaitu mengurangi proporsi kemiskinan disemua dimensi setidaknya setengah dari semua masyarakat yang terdampak dalam kemiskinan sesuai dengan definisi nasional.<sup>2</sup>

Adapun program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007 merupakan salah satu program pemberdayaan keluarga miskin sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi masalah kemiskinan. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/KEP/MENKO/KESRA.IX/2007 yang dikeluarkannya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" bertugas untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun ada faktor Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkendala oleh beberapa faktor,

---

<sup>2</sup> Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, and Agustiyara Agustiyara, 'Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6.2 (2020), 64–74 <<https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045>>.

antara lain kecemburuan sosial antar Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak menerima bantuan PKH, pemahaman masyarakat yang kurang memadai tentang PKH, dan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menjadi peserta PKH. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PHK) adalah dengan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pihak kecamatan melakukan pendataan dengan berkoordinasi dengan BPS dan menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Kedua, pendamping sosial kecamatan secara bertahap memantau peserta di lapangan untuk melihat perkembangan mereka dan memastikan KPM memenuhi tanggung jawab mereka sebagai peserta PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PHK) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun beberapa contoh dari penelitian lain yang membantu menanggulangi masalah pengentasan kemiskinan yaitu UMKM di Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat UMKM di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang bergerak di berbagai industri, termasuk perdagangan komersial, pertambangan, manufaktur, real estate, dan jasa pendidikan. UMKM di Indonesia adalah alat yang berguna untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pekerja di Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja pada masa globalisasi ini mungkin mendapati bahwa UMKM memberikan peluang kerja yang cukup besar. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo

---

<sup>3</sup> Amalia Nur Azizah, 'Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan', *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 14.2 (2023), 1–10 <<https://doi.org/10.35724/jies.v14i2.5364>>.

memberdayakan UMKM di wilayahnya. Salah satu inisiatif tersebut adalah Program 1000 Wirausaha Baru yang telah berjalan sejak tahun 2017. Meningkatkan modal, memperluas akses terhadap pinjaman modal berbunga rendah, meningkatkan ketersediaan uang bergulir, dan meningkatkan fasilitas merupakan cara-cara untuk memberdayakan usaha mikro secara ekonomi. infrastruktur yang mendukung usaha mikroekonomi. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo melaksanakan proyek 1000 Wirausaha Baru secara bertahap. Beberapa pelaku UMKM yang mengikuti program tersebut menyatakan bahwa tidak semua tahapan 1000 Wirausaha Baru mampu menyelesaikan semua tahapan tersebut. Dengan demikian, terdapat 435 perusahaan yang diizinkan secara hukum untuk beroperasi, sementara 400 perusahaan belum diizinkan secara hukum untuk beroperasi. Implementasi pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum maksimal.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan ini dibutuhkan banyak kolaborasi tidak sekedar lembaga pemerintah saja yang bisa mengatasi masalah kemiskinan meskipun demikian banyak pula lembaga non pemerintah yang berperan serta berpartisipasi dalam menanggulangi masalah ini. Lembaga non pemerintah salah satunya seperti lembaga LAZ-Harfa yang berdiri sejak tahun 2004 yang berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di wilayah Provinsi Banten.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Winda Kusumawati dan Kalvin Edo Wahyudi Fiddianing Sopah, 'Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM DI Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Syntax Idea (JSI)*, 8.75 (2020), 147–54.

<sup>5</sup> 'Iin Indriati, Field Facilitator LAZ-Harfa Desa Cihanjuang, Di Wawancarai Di Desa Cihanjuang, Pada 10 Januari 2025'.

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga LAZ- Harfa dapat berpartisipasi sangat baik dalam menanggulangi persoalan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Provinsi Banten sudah memiliki banyak peran partisipasi kesejahteraan masyarakat yang mengatasi masalah kemiskinan atau yang tidak mampu dari lembaga non pemerintah salah satunya yaitu program Budidaya Ternak Domba Terpadu yang diberikan oleh lembaga LAZ-Harfa memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dimana program tersebut bisa memanfaatkan ternak kambing bergulir dan kotoran kambing yang dapat diproseskan menjadi pupuk organik padat,<sup>6</sup> berkontribusi dalam upaya pengetasan kemiskinan melalui pendampingan ekonomi dan bentuk bantuan ekonomi lainnya.

Pengangguran yang tinggi dan keterbelakangan merupakan indikator umum kemiskinan. Masyarakat yang tidak berkecukupan biasanya kurang mampu berbisnis dan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap kegiatan ekonomi, yang berarti mereka akan jauh tertinggal dari orang lain yang memiliki potensi lebih besar. Kemiskinan absolut dan relatif adalah dua kategori kemiskinan yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan. Jika pendapatan seseorang kurang dari garis kemiskinan absolut yaitu, kurang dari apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka-mereka dikatakan benar-benar miskin.<sup>7</sup>

Kampung Cihanjuang salah satu Kampung yang menerima program budidaya ternak domba terpadu, karena sudah dipercayai mampu

---

<sup>6</sup> 'Daryah, Warga Kampung Cihanjuang, Di Wawancarai Di Kampung Cihanjuang, Pada 10 Januari 2025'.

<sup>7</sup> Sari Wulandari and others, '1347-Article Text-3398-1-10-20220228', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3209–18.

dan tepat untuk masyarakat Kampung Cihanjuang mengelola program tersebut. Tidak hanya itu, alasan lembaga memilih Kampung Cihanjuang karena ada pengajuan program dari mitra, relawan atau masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan hasil survei di lapangan Januari 2022, Kampung Cihanjuang memiliki potensi alam dan lahan perkarangan daun hijau sangat luas dan lokasi yang strategis untuk menerima program budidaya ternak domba terpadu, dan potensi alam yang sangat cocok untuk digunakan pertanian dan peternakan karena mayoritas masyarakat di Kampung Cihanjuang merupakan petani dan peternak. Program ini hadir salah satunya ingin memberdayakan para peternak kecil di pedesaan agar bisa mandiri dan perekonomiannya bisa tumbuh.

Peternakan budidaya ternak domba terpadu ini didampingi oleh lembaga LAZ-Harfa dengan peduli kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibina oleh para *Field Facilitator* (FF). Program yang di berikan lembaga LAZ-Harfa yaitu program “Budidaya Ternak Domba Terpadu” untuk Kampung Cihanjuang telah berjalan sejak April 2022 yang lalu dengan guliran pertama yaitu 12 ekor domba yang diberikan kepada 12 mustahiq dan digulirkan kepada mustahiq lainnya jika sudah masanya. Namun, pernah terjadi permasalahan yang janggal setelah memberikan domba 12 ekor kemudian ditunggu setelah setahun setengah dan ternyata hasilnya hanya 6 ekor domba saja yang hamil (*bunting*) dan sisanya 6 ekor mengalami kegagalan, dikarenakan permasalahan tersebut program LAZ-Harfa mengatasi masalah dengan membeli domba 9 ekor tetapi dengan keadaan 8 ekor domba sudah hamil (*bunting*) dan 1 ekor domba jantan (laki-laki). Akhirnya terdapat guliran kedua yaitu 9 ekor domba yang diberikan kepada 9 mustahiq serta digulirkan kepada mustahiq lainnya dalam jangka waktu sekitar 6 bulan sekali atau setahun dua kali.

Domba merupakan ternak runansia kecil yang mempunyai fungsi secara ekonomi (sebagai penyumbang perekonomian keluarga sebagai tabungan, tambahan dan memenuhi kebutuhan finansial yang mendadak) dan pemenuh kebutuhan protein hewani.<sup>8</sup>

Program ternak domba yang semakin berkembang dengan jumlah domba yang melahirkan semakin banyak, pertambahan jumlah populasi ternak domba akan menyebabkan bertambahnya pupuk organik dari kotoran domba tersebut, Maka dari itu masyarakat Kampung Cihanjuang bisa berdampingan mempunyai hasil usaha selain dari ternak domba bisa memanfaatkan kotoran dari domba untuk dijadikan tanaman-tanaman dari pupuk kotoran domba dapat mempermudah penyediaan bahan baku kotoran untuk penanaman tumbuhan seperti, sawi, pare, bayam, cabai, timun dan masih banyak lagi.

Usaha ternak domba terpadu ini sangat memiliki banyak potensi besar karena dengan membudiyakan domba bisa mensejahterakan Kampung Cihanjuang dan bisa mengangkat perekonomian mendesak, karena program ini sangat meningkat dan berkembang domba yang dibudidayakan oleh masyarakat sudah terkumpul sebanyak 28 ekor domba yang sudah berkembang sampai saat ini, dari awal mulai berdirinya program ini pada April 2022 yang lalu, berawal hanya 9 ekor kini menjadi banyak dan sangat berperan sekali lembaga LAZ-Harfa kepada masyarakat, contohnya seperti Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> 'Iin Indriati, Field Facilitator LAZ-Harfa Desa Cihanjuang, Di Wawancarai Di Desa Cihanjuang, Pada 10 Januari 2025'.

<sup>9</sup> 'Uum, Warga Kampung Cihanjuang, Di Wawancarai Di Kampung Cihanjuang, Pada 10 Januari 2025'.

Program ini sangat bermanfaat karena memungkinkan individu untuk belajar sendiri di bawah pengawasan dari *Field Facilitator* (FF) lapangan lembaga LAZ-Harfa. perekonomian masyarakat setempat sebelumnya sulit akan memiliki lapangan pekerjaan karena ketatnya persaingan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, program ini menandakan masyarakat sedang kebingungan dalam mencari pekerjaan. Banyak penduduk setempat yang menganggur karena tidak mampu bekerja di luar lingkungannya. Dengan mengajarkan masyarakat cara beternak domba dengan bantuan dari lembaga LAZ-Harfa, inisiatif ini sudah mulai mentransformasi perekonomian.

Peneliti memilih program budidaya ternak domba terpadu di Kampung Cihanjuang sebagai tempat penelitian ini dikarenakan peneliti tertarik pada program budidaya ternak domba, budidaya ternak domba terpadu merupakan program yang dilaksanakan oleh LAZ-Harfa dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat desa, salah satunya yaitu para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dalam program budidaya ternak domba terpadu. Zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak habis dikonsumsi melainkan dikelola dalam bentuk usaha, melalui usaha tersebut *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari terus menerus.

**“Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Ternak Domba Terpadu (studi kasus di binaan LAZ-Harfa, Kampung Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang)” .**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ternak domba terpadu di Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ternak domba terpadu di Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada permasalahan yang disampaikan di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ternak domba terpadu di Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang
- b. Untuk mendeskripsikan hasil pemberdayaan melalui program budidaya ternak domba terpadu di Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta diharapkan bisa menjadi bahan kajian literatur yang nantinya akan bermanfaat bagi siapa saja yang berminat

untuk meneliti dan menelaah lebih mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program budidaya ternak domba terpadu yang terus berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Pandeglang.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan persembahan kepada :

### **a. Bagi Peneliti**

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penelitian skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan masukan untuk Masyarakat Cihanjuang

### **c. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di ranah lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pihak-pihak yang lain

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Budidaya Ternak Domba Terpadu” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tidak Mampu

di Provinsi Banten” sangat diperlukan bahan perbandingan dalam karya ilmiah ini dari beberapa sumber berupa, skripsi, tesis, jurnal. Maka dari itu penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah di bawah ini ialah:

*Pertama*, skripsi Siti Rizka Khusnul Khotimah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2022). Universitas Sunan Ampel Surabaya berjudul “Pemberdayaan Umat Melalui Ternak Kambing Bergulir Perspektif Maqashid Syariah di NU Care-LAZISNU Kota Kediri” bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana pemberdayaan umat yang dilakukan NU Care-LAZISNU Kota Kediri melalui program ternak kambing bergulir. Kesimpulan pada penelitian ini pemberdayaan umat melalui ternak kambing bergulir yang dilaksanakan oleh NU Care-LAZISNU Kota Kediri menunjukkan hasil yang positif. Program ini berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan adanya penerimaan hasil ternak oleh sebagian warga. Namun, perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan perkembangan program dan peningkatan hasil di masa depan. Tahapan pelaksanaan yang meliputi penentuan wilayah, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, dan pemandirian masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memberdayakan umat secara efektif.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi Moch. Isnain Farrifqi Zainul Hasan dari Fakultas Dakwah (2023). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Badan Usaha Miliki Desa Melalui Pengembangan Peternakan Kambing Sistem Ternak Terpadu Tidak Terbatas Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember” bertujuan mensejahterakan rakyatnya untuk mencapai

---

<sup>10</sup> Siti Rizka Khusnul Khotimah, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kambing Bergulir Perspektif Maqashid Syariah Di NU Care-Lazisnu Kota Kediri, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabsaya, 2022)’,.

pembangunan, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintah yang dekat dengan masyarakat yang membuat semua panduan operasional desa yang dibutuhkan tersedia. Kesimpulan pada penelitian ini pertumbuhan peternakan kambing Bumdes Desa Suco dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa program ini dilakukan secara metodis dan bertahap. Diawali dengan identifikasi masalah melalui persiapan dan penilaian, langkah selanjutnya meliputi pengembangan program alternatif, penerapan budidaya, dan penilaian keberlanjutan program. Agar pemberdayaan lebih sukses dan bertahan lama, unsur-unsur pendukung seperti kesadaran masyarakat dan kendala keuangan harus diatasi, sementara unsur-unsur pendukung seperti bantuan pemerintah desa dan sumber daya manusia sangatlah penting.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi Azzata Faiqotul Himmah yang dari Fakultas Dakwah (2024). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Peternak Kambing Desa Karangsewu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Oleh Laz Nurul Hayat Yogyakarta” bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak kambing terkait peningkatan ekonomi peternak dan membantu memenuhi kebutuhan kambing saat berqurban. Kesimpulan pada penelitian ini Hasil Program Peternakan Desa Sejahtera Yogyakarta yang bertujuan untuk memberdayakan peternak kambing secara ekonomi menunjukkan bahwa program tersebut dilaksanakan secara metodis dan mencakup sosialisasi, pendampingan, pembangunan organisasi, dan ketersediaan modal. Para peternak mendapat manfaat dari peningkatan keahlian, lebih banyak

---

<sup>11</sup> Moch. Isnain Farrifqi Zainul Hasan, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa Melalui Pengembangan Peternakan Kambing Sistem Ternak Terpadu Tidak Terbatas, Jember, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)’.

peluang pemasaran, pelatihan zakat, dan lebih banyak pendapatan. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah tantangan mendapatkan bibit kambing. Oleh karena itu, kelanggengan program ini bergantung pada perhatian yang cermat terhadap faktor pendukung dan penghambat.<sup>12</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Pada hakikatnya, teori merupakan alat untuk menguraikan dan menganalisis isu-isu penelitian guna memperjelas tujuan dan parameter penelitian. Penelitian ini dapat dijelaskan melalui sejumlah studi dan hipotesis, termasuk:

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Berbicara pemberdayaan Tentu saja, hal ini tidak dapat dipisahkan dari definisi pemberdayaan itu sendiri. Dari sudut pandang konseptual, istilah "kekuasaan" merupakan akar dari kata pemberdayaan dan pemberdayaan. Selanjutnya, kekuasaan ini dikaitkan dengan kapasitas untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan agen pemberdayaan. Sebaliknya, pemberdayaan menggambarkan populasi yang lemah dan kurang beruntung. Orang yang diberdayakan biasanya memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk pengetahuan, modal, kapasitas, kebebasan, dan akses. Akibatnya, kekurangan ini membuat mereka tidak mampu atau miskin.<sup>13</sup> Menurut Suharto, Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Azzata Faiqotul Himmah, 'Pemberdayan Ekonomi Peternak Kambing Desa Karangsewu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Oleh Laz Nurul Hayat, Yogyakarta, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2024)',.

<sup>13</sup> Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Sektor Publik* ((Kota Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi), 2022).

memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Lebih lanjut, pemberdayaan mengidentifikasi keadaan yang ingin dicapai oleh suatu perubahan pada tataran sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi serta kebutuhan sosial seperti rasa percaya diri, menyatakan aspirasi, mempunyai sarana penghidupan, melakukan kegiatan sosial, dan mandiri menyelesaikan pekerjaan hidupnya.<sup>14</sup> Pemberdayaan dapat diamati di komunitas mana pun yang memiliki kapasitas untuk maju, dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran akan potensi diri, dan mengupayakan peningkatan potensi yang dimiliki sebagai suatu proses belajar mengajar yang terencana dan metodis, maka pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap orang.<sup>15</sup>

Pemberdayaan masyarakat Menurut Ambar Teguh Sulistiyani, konsep pemberdayaan berasal dari kata *power* yang dalam bahasa Inggris berarti kekuatan, daya, atau kapasitas untuk bertindak serta melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengelola dan mengarahkan hidupnya secara mandiri dan berdaya guna. Dalam perkembangannya, istilah pemberdayaan juga diserap dari kata *empower*, yang memiliki dua pengertian utama menurut Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary. Pertama, *empower* berarti memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang lain, atau

---

<sup>14</sup> Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat*, 2023, p. 4.

<sup>15</sup> Afriansyah, p. 6.

mengalihkan wewenang tersebut agar pihak yang diberi kuasa mampu membuat keputusan secara mandiri. Kedua, istilah ini juga dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau memampukan seseorang, baik melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, maupun peningkatan kapasitas lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sebatas memberikan otoritas formal, tetapi juga menyangkut proses membangun kompetensi dan kepercayaan diri individu atau kelompok agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan menjadi pendekatan penting dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok yang rentan atau terpinggirkan.<sup>16</sup>

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu taktik yang digunakan dalam pengembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara (Pasal 1 ayat (8)). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat sasaran program sehingga bersifat inklusif. Pencapaian program tingkat aktivitas individu yang diberdayakan sama pentingnya dengan pihak yang melakukan pemberdayaan.<sup>17</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bersama agar pertumbuhan dapat berjalan secara terarah, masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki ruang lingkup kehidupan yang sama. Tempat bersama yaitu, lokasi fisik bersama bagi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Tyas Arma Rindi, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata, Lampung Timur, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)'.

<sup>17</sup> Afriansyah, pp. 6–7.

Misalnya, perumahan di wilayah perkotaan, kota di wilayah pedesaan, atau organisasi lingkungan. "Kepentingan bersama" dalam masyarakat adalah kepentingan yang didasarkan pada identitas dan budaya bersama.<sup>18</sup>

Menurut Kartasasmita pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>19</sup>

## 2. Konsep Pemberdayaan

Dalam konteks implemementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan dengan Istilah "*community development*" (CD) sering digunakan dalam organisasi masyarakat sipil, LSM, dan komunitas pembangunan untuk mendukung atau mendorong masyarakat dalam berbagai kegiatan. Tujuan dari proses CD adalah untuk memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik bagi setiap individu. Pengertian pemberdayaan mempunyai pandangan yang lebih luas dalam konteks pembangunan. Pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat dan metode partisipatif sering kali digabungkan. Metode partisipatif, misalnya, sering digunakan untuk menggambarkan pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Dengan metode ini, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek partisipan yang

---

<sup>18</sup> Irwansyah Donny Prasetyo, 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), 164–65 <<https://doi.org/10.38035/JMPIS>>.

<sup>19</sup> Edi Martono Muhammad, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata', *Ketahanan Nasional* (23, No1, 27 April), 2017, 2.



mengambil keputusan mengenai pelaksanaan suatu program pembangunan. Kemampuan untuk secara aktif merencanakan dan mengambil keputusan dalam proses diberikan kepada masyarakat, yang mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan hasil.

Masyarakat semakin bergantung pada berbagai program selama proses pemberdayaan, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dimiliki adalah hasil kerja sendiri dan hasilnya dibagikan kepada pihak lain. Moelijarto menegaskan, semua manusia dan masyarakat mempunyai potensi yang belum tergali. Pemberdayaan dengan demikian merupakan upaya untuk meningkatkan potensi diri dengan cara memupuk dorongan, menonjolkan potensi diri, dan berupaya mewujudkannya. Dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran akan potensi diri, dan mengupayakan peningkatan potensi yang dimiliki sebagai suatu proses belajar mengajar yang terencana dan metodis, maka pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap orang. Setiap peradaban yang memiliki kapasitas untuk tumbuh mungkin menunjukkan pemberdayaan.<sup>20</sup>

### **3. Tahap Pemberdayaan**

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahapan intervensi sosial dalam penerapan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Afriansyah, pp. 5–6.

<sup>21</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), p. 206.

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini ada dua langkah yang perlu diselesaikan pada tahap ini: yang pertama adalah penyimpanan petugas, yaitu petugas pemberdayaan masyarakat, yang dapat diselesaikan oleh petugas masyarakat. Kedua, petugas masyarakat dan kesiapsiagaan lapangan.

2. Tahapan Assessment

Proses assessment yang dilakukan di sini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dengan kebutuhan yang dirasakan atau dilaporkan adalah bagaimana proses evaluasi dilakukan di sini, selain sumber daya klien.

3. Tahapan Perencanaan Alternatif

Pada tahap ini, pekerja masyarakat, yang merupakan agen perubahan, melibatkan masyarakat dalam proses partisipatif untuk mempertimbangkan berbagai masalah yang mereka hadapi dan berbagai solusi yang mungkin. Diharapkan masyarakat akan mampu menghasilkan sejumlah kegiatan program yang dapat dilaksanakan dalam situasi ini.

4. Tahapan pemformulasian rencana aksi

Pada tahap ini, setiap kelompok menerima bantuan dari agen perubahan dalam merumuskan dan memutuskan program dan kegiatan mana yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada. Petugas juga membantu menuangkan pemikiran mereka ke dalam tulisan, terutama saat mengajukan penawaran kepada donatur.

5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program.

Salah satu fase terpenting dalam proses pengembangan

masyarakat adalah tahap implementasi, karena tanpa kolaborasi antara agen perubahan dan penduduk (masyarakat berdaya), bahkan inisiatif yang direncanakan dengan baik pun mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Tahap evaluasi dan hasil perubahan.

Evaluasi sebagai proses yang dimana warga setempat diikutsertakan dalam proses evaluasi, yaitu proses pengawasan oleh polisi dan warga terhadap kegiatan pembangunan masyarakat yang sedang berlangsung. Diharapkan dalam waktu dekat akan terbentuk suatu komunitas untuk pengawasan internal dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat saat ini, komunikasi masyarakat yang lebih otonom dapat terwujud.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra yaitu:<sup>22</sup>

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah Adanya kesetaraan atau kedudukan yang sejajar antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik bagi perempuan maupun laki-laki, merupakan premis utama yang harus dipertahankan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan dibangun melalui terciptanya sistem pertukaran informasi, keterampilan, dan pengalaman. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran timbal balik, setiap orang mengakui

---

<sup>22</sup> Rindi, pp. 19–20.

kelebihan dan kekurangan orang lain.

## 2) Partisipasi

Inisiatif pemberdayaan partisipatif yang diselenggarakan, dilaksanakan, diawasi, dan dinilai oleh masyarakat dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, untuk mencapainya, diperlukan kesabaran dan program bimbingan dengan delapan mentor yang berdedikasi tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3) Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah gagasan di balik kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari luar. Gagasan ini melihat orang miskin sebagai individu dengan kapasitas terbatas (yang memiliki sedikit), bukan sebagai objek yang tidak mampu (yang tidak memiliki). Mereka memiliki tenaga dan kemauan, memiliki pemahaman menyeluruh tentang keterbatasan bisnis mereka, menyadari keadaan lingkungan sekitar mereka, memiliki kapasitas untuk menabung, dan terbiasa dengan konvensi sosial yang telah lama berlaku.

## 4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk keberlanjutan, sekalipun peran fasilitator pada awalnya lebih diutamakan daripada peran masyarakat, program pemberdayaan harus direncanakan agar berkelanjutan. Akan tetapi, ketika masyarakat sudah mampu menjalankan urusannya sendiri, posisi fasilitator lambat laun akan berkurang dan akhirnya menghilang.

## 5. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto, pemberdayaan masyarakat memiliki tiga tujuan, yaitu: Peningkatan Kelembagaan “Kelembagaan yang Lebih Baik” adalah organisasi yang memiliki visi, misi, tujuan, target yang terukur, dan program kerja yang terarah. Dengan demikian, setiap peserta kegiatan merasa berdaya dan memiliki peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan.

Perbaikan Usaha “*Better Business*”, di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya Peningkatan "Bisnis yang Lebih Baik" Bisnis diperlukan untuk meningkatkan operasi yang dapat memuaskan semua anggota lembaga dan menawarkan keuntungan yang luas bagi masyarakat umum, di samping kegiatan dan peningkatan kelembagaan

Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”, diharapkan peningkatan lembaga akan mampu meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan bagi keluarga dan masyarakat. Peningkatan Lingkungan "Lingkungan yang Lebih Baik" Aktivitas manusia saat ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan untuk memenuhi tuntutan manusia.

Perbaikan Hidup “*Better Living*”, pada akhirnya setiap keluarga dan masyarakat harus memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik berkat pendapatan yang baik dan lingkungan yang lebih baik. Peningkatan "Masyarakat yang Lebih Baik" menyatakan bahwa kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang didukung oleh

lingkungan sosial dan fisik yang lebih baik, dengan harapan bahwa kehidupan masyarakat yang lebih baik juga akan terwujud.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang ditemui dan perilaku yang diamati.<sup>24</sup> Lokasi di lembaga LAZ-Harfa Kampung Cihanjuang Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang peran lembaga LAZ-Harfa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kampung Cihanjuang Desa Cihjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

### **2. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu uraian dengan cara apa data didapatkan atau dikumpulkan.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara

---

<sup>23</sup> Dede Maryani, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Industri', 5, pp. 8–10.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Ha.11.

<sup>25</sup> *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang: Fakultas Dakwah UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 2022, xvi.

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan lembaga LAZ-Harfa yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian di lembaga LAZ-Harfa. Keikutsertaan peneliti ini dilakukan guna mengeksplorasi lebih dalam, sampai mana kontribusi lembaga LAZ-Harfa melakukan pemberdayaan masyarakat. Peneliti melakukan pengamatan dengan datang ke lokasi lapangan sejak tanggal 06 Oktober 2024 hingga tanggal 19 April 2025.

b. Wawancara

Menurut Moh. Pabundu yang mengutip dari S. Nasution, wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>28</sup>

Peneliti mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang ditulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Peneliti melakukan wawancara dengan merekam isi pembicaraan tersebut serta mencatat hal-hal penting

---

<sup>26</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Penelitian Geografi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), p. 44.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), p. 145.

<sup>28</sup> Moh. Pabundu Tika, p. 48.

yang telah disampaikan oleh informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber Sekretaris Desa, Ketua RT, Pendamping Desa / Field Facilitator (FF), Pengurus Yayasan Harapan Dhuafa, Masyarakat yang di Berdayakan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa arsip kelurahan, daftar buku anggota program lembaga LAZ-Harfa, struktur pengurus lembaga LAZ-Harfa, daftar harga produk pemberdayaan dan foto kegiatan pemberdayaan.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti.<sup>30</sup> Penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak- pihak yang berhubungan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, p. 137.

<sup>30</sup> Moh. Pabundu Tika, p. 44.



dengan penelitian ini, dengan melalui observasi pengamatan langsung, wawancara dengan pendiri lembaga LAZ-Harfa, pengurus program pemerdayaan, aparaturn kelurahan, warga dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi dan perpustakaan.<sup>31</sup> Adapun data yang diperoleh berupa data dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis Desa Cihanjuang, buku-buku, internet serta sumber lainnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersama pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data- data yang

---

<sup>31</sup> Moh. Pabundu Tika, p. 44.

dikumpulkan dari objek penelitian yaitu di lembaga LAZ-Harfa, yang berupa hasil program-program pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup>

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>33</sup> Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai program pemberdayaan. Adapun program pemberdayaan yang dilakukan lembaga LAZ-Harfa berupa program pemberdayaan masyarakat dengan program ternak domba.

Uraian dari perencanaan, pendekatan, pelaksanaan dan monitoring, serta keberhasilan yang didapatkan dari pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh lembaga LAZ-Harfa

### 5. Verifikasi

Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>34</sup> Penulis memberikan kesimpulan terhadap data yang sudah ada dan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh penulis berasal dari kegiatan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>32</sup> Sugiyono, p. 247.

<sup>33</sup> Sugiyono, p. 249.

<sup>34</sup> Sugiyono, p. 252.

di lembaga LAZ-Harfa, dengan melakukan pengamatan saat pelaksanaan program pemberdayaan ternak domba. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis agar masalah yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, penulis melakukan analisis dengan menggunakan logika agar masalah dapat terjabarkan sehingga dapat mengambil kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yakni pertama, Berisi tentang Profil lembaga LAZ-Harfa meliputi: Sejarah lembaga LAZ-Harfa, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Program LAZ-Harfa. Kedua, gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang letak geografis, kondisi demografi (jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan dan sarana prasarana).

**BAB III** Menjelaskan tentang pelaksanaan program-program lembaga LAZ-Harfa dalam pemberdayaan masyarakat, bab ini dibagi dalam dua sub bab yakni pertama, tentang proses dan tahapan-tahapan program lembaga LAZ-Harfa. Kedua, menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat LAZ-Harfa Banten melalui program budidaya ternak domba terpadu bidang ekonomi

**BAB IV** Pembahasan dari hasil proses pelaksanaan program

lembaga LAZ-Harfa. Dampak dan faktor faktor penghambat program  
Perternakan Domba terhadap masyarakat dan Lembaga LAZ-Harfa.

**BAB V** Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-  
saran atau rekomendasi